

**UPAYA MEMBANGUN STABILITAS NASIONAL PADA KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA  
MASA ORDE BARU (1967-1971)**

**Tom Kusuma<sup>1</sup>, Bahtiar Afwan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro  
E-mail: tomykus12@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to describe foreign policy in the field of politics and economics in the early days of the New Order. The method used is the historical research method, namely the study of other sources containing information about the past and carried out systematically. Based on the results of research showing in the political field, Indonesia in the New Order era took a policy to normalize relations between Indonesia and Malaysia, this was based on the condition of the Indonesian economy which was hit by prolonged inflation since the Old Order era. Re-entered as a member of the United Nations and formed the ASEAN regional organization (Association of South East Asia Nations). In the economic field, the steps taken are rescheduling foreign debt, good relations with western countries, this can be proven by the formation of the IGGI (Intergovernment Group On Indonesia). Integrating the Indonesian economic system with the economic system of liberalism as the fruit of the New Order Technocrats' thoughts, the correlation is that foreign investment is allowed to enter through the Foreign Investment Law. The results of this study can be concluded, the direction of foreign policy in the early New Order era was to improve the Indonesian economy, establish good relations with the west with the IGGI, strengthen relations with the Southeast Asian region with the existence of ASEAN and stop confrontation.*

**Keywords:** *New Order Foreign Policy, New Order National Stability*

**PENDAHULUAN**

Kedanaan ekonomi Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru mengalami guncangan dahsyat ditandai dengan hiper Inflasi yang mencapai 650 persen terlebih pada masa pemerintahan Soekarno Indonesia menerapkan sikap anti barat (Notosusanto, 1992). Kondisi sulit tersebut mengharuskan pemerintah untuk segera melakukan stabilisasi dan rehabilitasi dibidang ekonomi, dengan melihat kondisi prekonomian tindakan perbaikan ekonomi dipandang Orde Baru mustahil untuk dilakukan jika hanya mengandalkan kekuatan dari dalam negeri. Oleh karena itu upaya menutup diri dari bantuan asing mulai ditinggalkan diganti dengan sikap membuka diri, berorientasi keluar, menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara barat. yang bertujuan untuk melancarkan pembangunan itu sendiri. Kebijakan yang digunakan pun kebijakan pintu terbuka, dengan meningkatkan investasi asing dan mencari bantuan dana untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia (Suryadinata, 2019).

Pengendalian ekonomi harus segera dilaksanakan oleh pemerintahan Soeharto kala itu, untuk dapat mengendalikan prekonomian membutuhkan biaya serta kerjasama dari semua lapisan termasuk kerjasama luar negeri. Dari kondisi yang sudah dijelaskan diatas maka dalam misi mewujudkan Stabilitas Nasional dibidang politik maupun ekonomi, pemerintahan Orde Baru menyiapkan Undang-undang yang menjadi landasan operasional. Dalam sidang MPRS tahun 1966 dikeluarkanya dua ketetapan antara lain (Sabir, 1987):

1. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia.
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 mengenai kebijakan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Dengan ditetapkannya landasan baru maka politik luar negeri era Orde Baru harus memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia, sejak Soeharto memimpin terjadi perubahan siklus politik luar negeri Indonesia yang menganggap negara barat lah yang dapat membantu Indonesia untuk keluar dari kondisi sulit yang sedang dialami. terjadinya perubahan terhadap hubungan ekonomi Internasional, Indonesia tak memandang asing sebagai musuh dan lebih mengarahkan untuk kerjasama menjalin hubungan bilateral maupun multilateral untuk menyelamatkan ekonomi nasional dari kebangkrutan di akhir tahun 1965.

Upaya membangun stabilitas nasional, merupakan respon logis yang harus dilakukan pemerintah untuk mengakhiri tahun-tahun kelam pasca lengsernya Soekarno. Pada intinya Orde Baru menggemborkan pada khalayak ramai bahwa fokus utama pemerintah adalah penyelamatan ekonomi, atau ekonomi menjadi fokus utama pada era awal kepemimpinannya.

## **METODE**

Secara sistematis penelitian sejarah secara sederhana dapat dijabarkan dengan beberapa tahap. Dikutip dari Kuntowijoyo (2005: 91) menjelaskan bahwa "Penelitian sejarah mempunyai lima tahap, yaitu (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan". Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian historis dimana peneliti melakukan studi kepustakaan, mengumpulkan berbagai macam sumber seperti buku, jurnal, artikel maupun tulisan-tulisan yang relevan dan dianalisis terkait dengan topik yang akan diteliti. penulis memperoleh dari sejumlah perpustakaan antara lain : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro dan Perpustakaan Nasional Indonesia (Online).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Luar Negeri Dibidang Politik**

Pada masa awal pemerintahan, Soeharto membuat kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan pemerintahan sebelumnya, seluruh kebijakan era Demokrasi Terpimpin yang menurut Orde Baru dapat merugikan segera untuk dievaluasi kembali demi tercapainya tujuan nasional, beberapa kebijakan tersebut antara lain :

#### **Menormalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia**

Ketika Malaysia berdiri, hubungan Indonesia dan negara baru Malaysia masih harmonis. Baru pada tahun 1963, ketika Malaysia memproklamkan berdirinya persekutuan Tanah Melayu, Soekarno mulai geram, karena dibentuknya persekutuan tanah Melayu adalah salah satu bentuk usaha-usaha dari negara-negara barat yang ingin menancapkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Sejak tahun 1963-1966 terjadi sebuah konfrontasi secara fisik antara Malaysia dan Indonesia yang dinamakan Dwikora baik yang berbatasan darat maupun laut. (Abidin, 2019) menjelaskan bahwa, implementasi politik luar negeri bebas dan aktif yang tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintahan Soekarno segera dievaluasi. Konfrontasi yang telah terjadi selama tiga tahun sejak 1963 pun berakhir ditangan Orde Baru, diganti dengan prinsip bertetangga baik, saling menghormati satu sama lain, menciptakan perdamaian dan melakukan hubungan

yang saling menguntungkan. faktor ekonomi pun menjadi pertimbangan mengapa konfrontasi dengan Malaysia harus segera dihentikan, pemerintah Orde Baru menganggap, apabila politik konfrontasi masih bergulir akan menelan biaya yang sangat besar padahal kondisi prekonomian Indonesia pada saat itu masih mengalami kelesuan (Arifin, et al, 2018).

Usaha untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan Malaysia, diawali dengan mengirim sebuah tim delegasi yang dipimpin oleh Adam Malik selaku menteri luar negeri Indonesia berangkat ke kota Bangkok Thailand pada 29 Mei-1 Juni 1966. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan nama persetujuan Bangkok. Usaha normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia kemudian mencapai puncaknya pada tanggal 11 Agustus 1966 (Arifin, et al, 2018: 108). Upacara penandatanganan persetujuan yang berlangsung di Gedung Pancasila, disaksikan langsung oleh ketua Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto. Selesai penandatanganan kedua Menlu berjabat tangan, seketika disambut dengan tepukan riuh dari para hadirin yang menyaksikan (Litbang Kompas, 2019c). Dengan begitu secara resmi berakhir lah konflik antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi selama tiga tahun. Orde Baru sebagai pemegang kekuasaan telah berhasil menyelesaikan konflik regional yang merugikan tersebut.

Sejak 31 Agustus 1967, kedua pemerintah telah membuka hubungan diplomatik pada tingkat kedutaan besar. Selain itu pemerintah Indonesia juga mengambil kebijakan untuk mengakui terbentuknya Republik Singapura pada 2 Juni 1966, pengakuan tersebut disusul dengan pelaksanaan hubungan diplomatik yang ditandatangani secara resmi pada 7 September 1967 oleh kedua Menteri Luar Negeri (Notosusanto, 1992).

### **Kerjasama Asia Tenggara (ASEAN)**

pada akhir tahun 1966 Indonesia menawarkan kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk berhimpun dalam suatu wadah organisasi kerja sama regional dalam rangka membangun dan mempererat hubungan di kawasan Asia Tenggara. Ide itu disampaikan kepada Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Myanmar. Terhadap tawaran itu, ternyata hanya Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand yang menyambut baik (Wiharyanto, 2010). Politik luar negeri Indonesia diimplementasikan untuk mendorong lahirnya kerjasama antar negara khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dikutip dari Arifin, et al (2018: 109), Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya didepan Dewan Perwakilan Rakyat pada 16 Agustus sebagai berikut :

“Apabila masalah Malaysia ini telah diselesaikan, kita dapat mengarah ke arah kegiatan-kegiatan dalam bidang kebijaksanaan luar negeri yang menjalin kerjasama yang erat berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara negara-negara Asia Tenggara. Kemudian akan menghidupkan kembali gagasan mafilindo dalam lingkup yang lebih luas untuk mencapai suatu Asia Tenggara yang bekerjasama dalam berbagai bidang, terutama bidang-bidang ekonomi, tehnik dan budaya”.

Maka dari itu pada tanggal 5 Agustus sampai 8 Agustus 1967 diadakan pertemuan di Bangkok yang terdiri dari lima negara Asia Tenggara yakni Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tun Abdul Razak), Singapura (S. Rajaratman), Fillipina (Narciso Ramos), Thailand (Thanat Khoman). kelima negara menyadari kesamaan kepentingan dan masalah yang dihadapi, serta berkeyakinan bahwa peningkatan

solidaritas dan kerjasama diantara negara- negara di kawasan Asia Tenggara merupakan sumbangan kearah terciptanya perdamaian, kemajuan dan kemakmuran (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1987).

Organisasi regional ASEAN secara resmi didirikan pada 8 Agustus 1967. Peran Indonesia dalam pembentukan ASEAN sangat kental bukan hanya sebagai anggota pendiri namun sebagai perumus nama yang dipakai. Pada mulanya nama yang diusulkan untuk dipakai organisasi tersebut adalah SEAARC (*South East Asian Association for Regional Cooperation*) namun usulan nama tersebut ditolak, hingga pada akhirnya Adam Malik, mengusulkan *Association of South East Asia Nations (ASEAN)* untuk digunakan sebagai nama perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (Setiawan, 2014).

### **Aktif kembali dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**

Soeharto sebagai pemegang kekuasaan selanjutnya menginginkan implementasi prinsip politik bebas dan aktif dilaksanakan dengan semurni- murninya hal tersebut dibuktikan dengan mendekatnya Indonesia dengan negara-negara barat dan aktif kembali dalam forum Internasional salah satunya PBB untuk dapat bangkit dari situasi terisolasi dunia luar. hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia menjalankan prinsip politik bebas dan aktif sesuai dengan kepentingan nasional dalam usaha untuk mencapai kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu terkait dengan keluarnya Indonesia dari PBB, pemerintah Orde baru melakukan peninjauan terhadap tindakan kebijakan yang telah diambil dibidang politik luar negeri dimasa silam. Notosusanto (1992: 476) menyatakan bahwa, setelah Indonesia mengalami situasi terisolasi dari pergaulan dunia luar, Indonesia merasa perlu ikut ambil bagian dalam kegiatan- kegiatan Internasional. atas dasar itulah Panitia musyawarah DPR-GR mengadakan rapat untuk mendorong pemerintah agar bersedia masuk kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebelum dimulainya sidang umum PBB ke 21.

Sejak 28 September 1966 bertepatan dengan sidang Umum ke 21 Indonesia secara resmi bergabung dengan PBB, dengan Adam Malik sebagai perwakilan resmi Indonesia. Delegasi Indonesia yang hadir dalam Sidang Umum tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Adam Malik, Menteri/Pangau Laksamana Udara Rusmin Nurjadin, Menteri Perindustrian Dasar M. Jusuf, L.N Palar dan Dr. H. Ruslan Abdulgani (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1987). Adam Malik dalam statemen pertamanya didepan mimbar PBB menyatakan bahwa Indonesia tengah fokus untuk membangun stabilitas ekonomi negerinya. Dijelaskan pula bahwa Indonesia akan tetap memegang teguh prinsip politik bebas aktif untuk meredakan ketegangan regional maupun Internasional guna menciptakan perdamaian. Adam Malik juga menyatakan maksud Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB adalah mengharapkan sebuah kerjasama dengan anggota lainnya sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam piagam organisasi dunia tersebut (Litbang Kompas, 2019b).

### **Pemutusan Hubungan Diplomatik Indonesia- Cina**

Politik Luar Negeri Indonesia setelah Soeharto menduduki kekuasaan berbeda secara drastis dengan ketika dibawah Soekarno. Pada awalnya ada kecendrungan untuk bergerak mendekati Barat, dan

ini terbukti melalui hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan sikapnya dengan Negara-negara komunis (Suryadinata, 2019: 46). Keberpihakan Indonesia terhadap Barat tidak bisa dilepaskan dari mendesaknya kebutuhan ekonomi pada saat itu sehingga Soeharto berupaya mencari bantuan luar negeri ke negara-negara Barat. Dari kondisi-kondisi seperti itu, dapat dilihat bahwa segera setelah Soeharto berkuasa Indonesia mulai meninggalkan politik luar negeri yang cenderung kekiri-kirian. Hal ini tampak dari adanya dugaan akan keterlibatan Cina dalam upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI yang berujung putusnya hubungan diplomatik dengan Cina pada 1 Oktober 1967 (Sudirman, 2014).

“Alasan pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat China karna pemerintah Orde Baru menganggap bahwa Republik Rakyat Cina terlibat dalam Gerakan 30 September. Pemerintah Indonesia juga menganggap bahwa Republik Rakyat Cina sebagai ancaman keamanan nasional” (Arifin, et al, 2018: 108).

Penilaian akan keterlibatan Cina tidak dapat dilepaskan dari adanya fakta akan adanya upaya PKI untuk membentuk Angkatan Kelima, dengan meminta bantuan terhadap Cina atas persetujuan Soekarno. Fakta tersebut membuat Suharto menilai bahwa Indonesia seharusnya menghindari interaksi dengan Cina demi kebaikan di masa depan. Ini tampak dari pernyataan Suharto dalam pidato kenegaraan pada 1967, dimana pada saat itu ia mengatakan bahwa keterlibatan Cina dalam kudeta tahun 1965 dan dukungan terhadap PKI yang terus berlanjut telah mengakibatkan hubungan tidak normal antara Indonesia dan Cina (Suryadinata, 2019: 132).

### **Kebijakan Luar Negeri Dibidang Ekonomi**

Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru adalah untuk menyelesaikan problematika yang diwariskan Orde Lama antara lain diambil untuk menyelamatkan prekonomian yang lesu pasca berkurangnya peran Soekarno dengan penundaan hutang yang sudah jatuh tempo, dikeluarkannya Undang-undang Penanaman Modal Asing untuk memberi ruang bagi investor menanamkan modalnya di Indonesia dan mencari bantuan atau pinjaman dari negara lain untuk merehabilitasi dan menciptakan stabilitas nasional.

### **Rescheduling Hutang Luar Negeri Indonesia**

Masa Orde Baru prekonomian mengalami kelesuan, ditandai dengan inflasi mencapai 650%, masalah yang terjadi pada awal kepemimpinan Soeharto tidak hanya sebatas Inflasi dan pemenuhan tuntutan rakyat (tritura) saja namun masalah hutang luar negeri yang harus dibayar. Hutang yang tercipta pada masa demokrasi terpimpin sangat amat besar mencapai 2,358 juta Dollar, hutang tersebut berasal dari Amerika Serikat, Jepang dan Uni Soviet. Pada era demokrasi terpimpin keadaan moneter mengalami kelesuan terlebih Indonesia dihadapkan dengan pembebasan Irian Barat yang jelas membutuhkan banyak biaya untuk operasionalnya saja, hal tersebut membuat hutang luar negeri tercipta khususnya kepada Uni Soviet. Ketersediaan dana merupakan akar dari masalah pembayaran hutang Indonesia kepada negara-negara yang sudah jatuh tempo tersebut (Susanti, 2016).

Pada tanggal 19 hingga 20 September 1966, telah diadakan sebuah perundingan yang membahas tentang penundaan pembayaran hutang luar negeri Indonesia dengan negara kreditor di Tokyo, Jepang.

Negosiasi tersebut kemudian dilanjutkan di Paris, Prancis, dan membuahkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan dalam penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia (Sudirman, 2014). Dikuip dari Notosusanto (1992: 438) mengemukakan bahwa :

“Di Amsterdam pada tanggal 23-24 Februari 1967 diselenggarakan pertemuan beberapa negara maju untuk membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan-kemungkinan pemberian bantuan pinjaman dengan syarat-syarat lunak. Pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama dari apa yang kemudian dikenal sebagai *Inter government Group On Indonesia (IGGI)*” (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1987: 140).

Pertemuan yang terjadi antara delegasi Indonesia dengan para kreditur secara eksplisit membahas keperluan-keperluan Indonesia untuk dapat diberikanya bantuan luar negeri dalam bentuk pinjaman dengan syarat yang lunak. Pertemuan yang berlokasi di kota Amsterdan Belanda itu pula merupakan awal dari sebuah organisasi yang mengkoordinasi bantuan luar negeri Indonesia yag dibentuk dengan nama *Inter government Group On Indonesia*. Dilansir dari (Litbang Kompas. 2019a) konferensi pada 23 Februari 1967 disepakati bahwa negara-negara kreditur menyanggupi dan merasa perlu diberikanya bantuan untuk menutupi kekurangan devisa yang melanda Indonesia sebesar 200 juta Dollar Amerika pada tahun 1967. Kemudian hasil dari konferensi negara kreditur yag tergabung dalam *IGGI* juga bersedia untuk memberikan bantuan senilai 325 juta Dollar kepada Indonesia.

### **Kebijakan Ekonomi Liberal ‘Teknokrat Orde Baru’**

Aspek ekonomi dan politik, masa transisi dari pemerintahan Soekarno menuju awal pemerintahan Soeharto dengan Orde Barunya, jelas menunjukkan suatu perubahan signifikan. Perubahan tersebut didasarkan atas pandangan pemerintah tentang sistem ekonomi sebelumnya yang anti asing, kini berbelok lebih pro terhadap mekanisme pasar. Transformasi itu tentunya tidak secara tiba-tiba, terdapat proses yakni dengan munculnya kelompok yang menggagas ide tentang haluan kapitalis. Kelompok yang berhasil merubah sistem prekonomian Indonesia tersebut tentunya memiliki kemampuan secara intelektual dan memiliki posisi penting dalam pemerintahan Orde Baru, kelompok itulah yang dinamai dengan Teknokrat Orde Baru.

Teknokrat ekonomi Orde Baru, memiliki peran penting yakni sebagai arsitek utama pembangunan ekonomi. Kelompok teknokrat memiliki kemampuan yang mereka bentuk selama menempuh pendidikan di University of California. mereka adalah Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, Subroto, Mohammad Sadli, dan J.B. Sumarlin atas dasar Intelektual yang mereka miliki dan pelajari membentuk menjadi sebuah keyakinan untuk mengubah wajah prekonomian Indonesia berdasarkan pengetahuan mereka selama berkuliah (Susanti, 2016).

“Karena perhatian Orde Baru pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, para teknokrat, yang kebanyakan adalah ekonom, diminta Soeharto untuk membuat rekomendasi kebijakan, seperti Undang-undang Penanaman Modal Asing, secara jelas diusulkan oleh kalangan teknokrat dan dipakai oleh Soeharto” (Suryadinata, 2019: 55).

Dari uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa, para teknokrat yang memiliki latar belakang Intelektual berpendidikan ala barat, menjadikan mereka sebagai kelompok penasehat yang sudah tentu

memiliki peranan penting dalam membuat kebijakan khususnya untuk sektor prekonomian. ditetapkan Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing pada tanggal 10 Januari 1967, merupakan hasil mereka dalam merumuskan kebijakan, sesuai dengan pandangan yang mereka miliki. Yakni ekonomi yang menaruh kepercayaan pada bekerjanya sistem pasar, sistem pasar dimaknai sebagai keterbukaan negara kepada aliran modal asing.

### **Penanaman Modal Asing sektor Migas dan Industri**

Sektor pertambangan merupakan bagian yang menjadi prioritas utama, dimanfaatkan untuk pembangunan jangka panjang dan dikonversi menjadi pendapatan ekonomi, sehingga modal asing perlu terlibat untuk sektor pertambangan minyak dan gas alam Indonesia. sesuai dengan tujuannya, Undang-undang Penanaman Modal Asing, secara riil menetapkan ketegasan hukum dan memberikan informasi bagi para investor asing. UUPMA yang dibuat sederhana mungkin mengandung beberapa kemudahan, termasuk keringanan pajak. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menarik para pemodal asing.

Berdasarkan aturan yang ditetapkan, persoalan kelonggaran bea masuk dan pajak penjualan sangat berarti bagi kontraktor minyak dan gas. Pada dasarnya, ketidak mampuan Indonesia dalam menyediakan peralatan dan teknologi yang digunakan untuk kebutuhan operasional, menyebabkan para kontraktor harus mendatangkan segala sesuatu, terkait operasional perusahaan dari luar negeri. Tentunya pembebasan pajak yang berkaitan dengan impor, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemodal asing untuk menandatangani kontrak di Indonesia. Sejak ditetapkan pada 1967 hingga 1972 kurang lebih 41 kontrak telah berhasil disepakati dengan nilai modal menyentuh angka 236 juta Dollar Amerika Serikat. Dari total kontrak yang ada, 73 persen merupakan kontrak dengan amerika atau 30 dari seluruh kontrak yang berhasil ditandatangani. Sisanya merupakan kontrak dengan Inggris, Belanda, Italia, Prancis, Australia dan Panama (Susanti, 2016).

Undang-undang Penanaman Modal Asing, secara nyata telah membuka keran investasi yang cukup menguntungkan bagi Indonesia. Terlebih setelah Soeharto menjabat sebagai Presidium kabinet maupun setelah dilantik menjadi Presiden, Indonesia dihadapkan dengan keadaan ekonomi yang carut marut. Terbukanya Indonesia terhadap modal asing, tak hayal dimanfaatkan negara- negara besar seperti amerika untuk berinvestasi di bumi pertiwi, selain amerika, Jepang juga ikut tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, apabila Amerika Serikat berada dalam sektor pertambangan beda halnya dengan Jepang yang berinvestasi dalam sektor pertambangan migas dan Industri. industri manufaktur Jepang dari total 5 perusahaan tekstil terbesar yang dimiliki Jepang, empat diantaranya telah memasuki pasar tekstil Indonesia yakni Teijin, Toray, Toyo Menka dan Kanebo (Rizki, 2013).

Tak hanya dalam sektor minyak dan gas bumi Indonesia yang telah dieksplor, Amerika Serikat pun berminat untuk membangun kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam sektor pertambangan logam mulia di samping undang-undang investasi, Undang-undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 juga memberikan keonggaran cukup besar kepada Freeport untuk beroperasi di Indonesia tepatnya di Timika Papua dengan memberikan jaminan kepada PT. Freeport undang-undang tersebut memberikan

keleluasaan mengeksplorasi tanah yang berada di Papua kala itu (Rinayuhani, 2017).

### **Dampak Kebijakan Luar Negeri Orde Baru**

Ditetapkan sebuah kebijakan tentunya membawa dampak bagi pembuatnya. Dalam bidang politik, berakhirnya konfrontasi dengan Malaysia menjadi faktor penting terjalinya kembali hubungan Indonesia dengan negara blok barat, terutama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Dengan negara-negara Asia Afrika dan Non Blok dijalin persahabatan yang lebih erat. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada pemerintahan Orde Baru memang sangat baik, dan negara ini merupakan salah satu penyumbang penting dalam bidang ekonomi Indonesia.

“Ketika Soeharto berkuasa kondisi Ekonomi di Indonesia porak-poranda dan sangat membutuhkan suntikan dana saat itu Amerika Serikat mau memberikan bantuan dengan satu syarat bahwa Indonesia bersedia mengakhiri konfrontasi (Irshanto, 2019: 96).

Dari kutipan diatas dapat diambil pengertian bahwa, pada masa awal pemerintahan Soeharto, kondisi prekonomian Indonesia sedang mengalami guncangan dan membutuhkan banyak bantuan untuk dapat pulih kembali. Amerika Serikat memberikan isyarat untuk menghentikan konfrontasi dengan imbalan bantuan prekonomian. Indonesia kala itu sedang membutuhkan bantuan bersedia untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dengan Malaysia. Hal ini membuat mengalirlah bantuan maupun kerja sama di bidang ekonomi, dari beberapa negara blok Barat seperti Amerika Serikat.

Keberpihakan Indonesia terhadap Barat tidak bisa dilepaskan dari mendesaknya kebutuhan ekonomi pada saat itu sehingga Soeharto berupaya mencari bantuan luar negeri ke negara-negara Barat. Dari kondisi-kondisi seperti itu, dapat dilihat bahwa segera setelah Soeharto berkuasa, Indonesia mulai meninggalkan politik luar negeri yang cenderung kekiri-kirian.

“Pembekuan hubungan diplomatik juga merupakan kepentingan nasional untuk menarik perhatian negara-negara barat dengan membangun citra sebagai negara yang anti komunis, sehingga Indonesia berharap mendapat bantuan dan pinjaman luar negeri dari negara-negara barat dan untuk menghindari potensi Indonesia jatuh ke tangan komunis” (Arifin, et al, 2018: 108).

Dari kutipan diatas dapat ditarik pengertian bahwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Cina, tak hanya didasarkan pada tuduhan keterlibatan dalam pemberontakan pada tahun 1965. Namun pemutusan hubungan diplomatik juga merupakan kepentingan nasional, untuk memperbaiki citra Indonesia sebagai negara yang anti komunis. Dengan begitu, setelah citra Indonesia kembali baik dimata negara barat, diharapkan mengalirlah bantuan-bantuan yang dapat membantu Indonesia dalam memperbaiki krisis prekonomian yang melanda awal pemerintahan Orde Baru.

Dalam hal ekonomi pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan menerapkan politik pintu terbuka artinya Indonesia membuka diri seluas luasnya menarik para Investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. hal tersebut tak bisa dilepaskan dari peran para Teknokrat Orde Baru, produk hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang- undang Penanaman Modal Asing sedikit bayaknya telah berhasil melahirkan perusahaan-perusahaan besar yang memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk bekerja pada perusahaan tersebut, tetapi perlu diingat bahwa

Investasi Jepang telah mendominasi seluruh sektor industri Indonesia. Hal ini menjadi pukulan bagi para pengusaha dalam negeri yang tidak diberi ruang untuk berkembang akibat dari dominasi Jepang. Keresahan-kerasan timbul di masyarakat dan golongan mahasiswa dipicu karena banyaknya tulisan-tulisan yang dimuat dalam media masa tentang penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan penanaman modal asing yang banyak merugikan perekonomian pribumi. Dikutip dari Priyowidodo (2018: 89) menyatakan bahwa :

“Tentu tidak salah bila strategi pembangunan ekonomi yang dijalankan Soeharto tersebut, menyulut keresahan di banyak kalangan terdidik (*well educated*) yang memicu terjadinya ketegangan. Bahkan memancing isu sensitif pada area SARA terkait isu pribumi versus non pribumi, Peristiwa Malari 1974, yang semula hanya terkait masalah penolakan kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei ke Jakarta (14-17 Januari 1974) menemukan momentum dengan kedatangan Ketua *Inter- Governmental Group on Indonesia (IGGI)*, Jan P. Pronk dijadikan alasan untuk demonstrasi anti modal asing”.

Sebagai akibat dari dominasi Jepang tersebut, terjadi keresahan- keresahan yang diawali dari letupan-letupan kegelisahan masyarakat terutama golongan mahasiswa terhadap pelaksanaan penanaman modal asing yang dilakukan oleh Jepang. Puncaknya terjadi pada 15 Januari 1974 atau dikenal dengan peristiwa Malari yang didasari adanya kesenjangan yang terjadi antara perusahaan Jepang dengan pribumi menimbulkan keresahan dan aksi protes dari kalangan mahasiswa.

## **KESIMPULAN**

Usaha mewujudkan stabilitas nasional Indonesia pada masa awal pemerintahan Soeharto nyatanya membutuhkan kebijakan luar negeri. Surat perintah sebelas Maret tahun 1966 (supersemar) merupakan landasan awal lahirnya Orde Baru, sejak saat itu terjadi perubahan besar dalam dinamika perpolitikan luar negeri Indonesia. Citra Indonesia „anti barat“ perlahan mulai dihapuskan, dengan wajah baru, Indonesia mencoba membuka diri terhadap dunia Internasional. Hubungan Indonesia dengan negara barat yang sebelumnya berada pada level terendah mulai dirajut kembali menciptakan konektivitas hubungan saling menguntungkan. Upaya demi upaya terus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi politik luar negeri yakni dengan menghentikan konfrontasi, merevitalisasi hubungan Indonesia-Malaysia, masuk kembali menjadi anggota PBB, membentuk organisasi regional ASEAN (*Association of South East Asia Nations*) serta memutuskan hubungan diplomatik dengan negara komunis Cina.

Politik luar negeri Indonesia pada era awal Orde Baru lebih diarahkan kepada negara-negara barat, hal ini dapat dibuktikan dengan terbentuknya *IGGI (Intergovernment Group On Indonesia)* sebagai pendonor bantuan untuk perekonomian Indonesia, kondisi perekonomian Indonesia yang carut marut mengharuskan pemerintah untuk mengambil kebijakan luar negerinya antara lain penundaan pembayaran hutang luar negeri dan memperbolehkan investasi asing masuk melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing atas saran dari kelompok Teknokrat Orde Baru.

## **SARAN**

Jika bangsa Indonesia belum mampu berdiri sendiri dalam aspek apapun maka sudah seharusnya para pemimpin Indonesia mencari bantuan untuk keberlangsungan negaranya, seperti halnya manusia

mahluk sosial yang tetap membutuhkan orang lain. Soeharto merupakan sosok pemimpin yang pernah menjabat sebagai Presiden selama kurang lebih 32 tahun yang pastinya memberikan kesan mendalam bagi bangsa Indonesia. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan topik mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya mewujudkan stabilitas nasional pada masa Orde Baru secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Y. 2019. *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*. UNAS PRESS- Universitas Nasional, Jakarta.
- Arifin, M, Z. et al. 2018. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973. *Jurnal Pattingalloang*, 5(1), h. 103-110.
- Hatta, M. 1965. "One Indonesian View of the Malaysia Issue" dalam *Asian Survey*. 5 (3) h.139-143.
- Irshanto, A, B. 2019. Dari Konfrontasi Ke Perdamaian (Hubungan Indonesia- Malaysia 1963-1966). *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 8(2), h. 96
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. PT Bentang Pustaka. Yogyakarta Litbang Kompas.
- 2019a. *Adam Malik: Mengawal Kesepakatan dengan IGGL*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Litbang Kompas. 2019b. *Adam Malik: Merah Putih Berkibar di PBB*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Litbang Kompas. 2019c. *Adam Malik: Kunci Normalisasi Indonesia-Malaysia*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Notosusanto, N. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Penerbit Balai Pustaka. Jakarta
- Priyowidodo, G. 2018. *KOMUNIKASI POLITIK: (Memahami dari Sisi Kepribadian dan Pemikiran Politik Soekarno dan Soeharto)*. PT. Raja Grafindo Persada. Depok
- Rinayuhani, T, R. 2017. Rational Choice Dalam Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Pt. Freeport Indonesia Rational Choice In Indonesia"s General Properties With Pt. Freeport Indonesia. *Jurnal Politik*. 13(1).
- Rizki, M. 2013. Investasi Asing Jepang Di Indonesia Masa Orde Baru Tahun 1967-1974. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*. 1(2), h. 231
- Sabir, M. 1987. *Politik Bebas Aktif*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. CV. Haji Masagung. Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1985. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. PT. Gita Karya. Jakarta.
- Setiawan, 2014. *Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Masa Adam Malik Tahun 1967-1973*. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Sudirman, A. 2014. *Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik Hingga Terkini*. Diva Press. Yogyakarta
- Suryadinata, L. 2019. *Politik Luar negeri Indonesia dibawah soeharto*. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. LP3ES. Jakarta.
- Susanti, E. 2016. Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional Pada Masa Orde Baru Tahun 1967-1981. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*. 4(3), h. 780.

Wiharyanto, K. 2010. Proses Berdirinya ASEAN. *Jurnal Pendidikan Sejarah*. 1(1). h